

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Dinamika Gerakan Sosial dalam Menolak Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu

Dinamika gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi terangkai dari banyak peristiwa, satu peristiwa sangatlah kompleks dan tidak bisa digambarkan hanya dalam satu aspek saja, melainkan harus diurai dari banyak aspek. Namun, setiap peristiwa gerakan ini bisa dipastikan bermuara sejak hadirnya pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Terutama kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu yang sejak awal tidak pernah melibatkan publik terutama masyarakat setempat, sehingga terkesan hanya memfasilitasi kepentingan korporasi pertambangan. Hal inilah yang memantik gerakan penolakan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

Apalagi mengingat Gunung Tumpang Pitu adalah hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan penyangga, sumber resapan air dan dihuni banyak spesies, maupun fungsi lain sebagai benteng alam yang mampu menahan angin pada musim-musim tertentu dan gelombang tsunami tahun 1994. Manfaat Gunung Tumpang Pitu juga sangatlah vital bagi masyarakat setempat terutama para petani, nelayan, dan penggiat pariwisata.

Pemicu gerakan dapat dibuktikan pada era Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari dan Wakilnya Yusuf Nuris pada tahun 2005-2010 yang sejak awal tidak

pernah melibatkan publik ketika pemberian izin kepada PT Indo Multi Niaga (IMN), maupun era Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wakilnya Yusuf Widyatmoko pada tahun 2010-2021 yang juga terkesan memfasilitasi PT Bumi Suksesindo (BSI). Peristiwa-peristiwa gerakan akhirnya mulai muncul sejak tahun 2008 hingga saat ini, dengan mengadopsi berbagai taktik gerakan.

Namun selama hampir dua dekade, dinamika gerakan sosial dalam merespon aktivitas pertambangan cenderung dinamis dan tidak terorganisir mengikuti dampak yang dirasakan masyarakat, jika dampak yang dirasakan semakin besar, maka semakin besar pula gerakan masyarakat. Gerakan menjadi melemah, ketika terdapat tekanan berupa represifitas maupun kriminalisasi yang mengarah kepada masyarakat. Akan tetapi, dinamika gerakan pada tahun 2018-2020 menunjukkan situasi berbeda karena belajar dari pengalaman, gerakan menjadi lebih konsisten dan terorganisir, partisipan gerakan juga semakin beragam bukan hanya dari masyarakat setempat.

4.1.2 Pemetaan Gerakan Sosial dalam Menolak Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu

Gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu ini tergolong dalam Gerakan Sosial Baru (GSB) yang dibuktikan dari banyak karakteristik. Hal ini dapat dibuktikan dari peta konstruksi gerakan, yakni: *Pertama*, medan atau area gerakan tolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu tidak terbatas pada daerah Banyuwangi saja, melainkan mencakup hingga daerah-daerah lain dari tingkat nasional sampai Internasional; *Kedua*, Struktur gerakan yang diadopsi adalah non-heirarkis yang menunjukkan pembagian peran

secara setara dari aktor-aktor atau setiap partisipan yang terlibat; *Ketiga*, Aktor dan partisipan dalam gerakan ini selain warga setempat sebagai aktor kunci, juga terdapat partisipan lain mulai dari organisasi-oragnisasi non-pemerintah, maupun para aktivis mahasiswa dan lingkungan yang memiliki jaringan yang luas; *Keempat*, Taktik dan pengorganisasian, taktik yang digunakan berupa gerakan penolakan kreatif dan mulai meninggalkan taktik revolusioner, dan dalam pengorganisasian juga mampu menjadikan partisipan gerakan sebagai wahana mobilisasi sumberdaya gerakan; dan *Kelima*, Tujuan dan Ideologi, tujuan gerakan ini agar kebijakan pemerintah mencabut izin pertambangan di Gunung Tumpang Pitu, dan gerakan ini tidak terlalu memperhatikan ideologi yang mendasar.

Sebagai GSB, gerakan tolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu masih belum bisa mencapai tujuannya dengan dibuktikan melalui Perspektif Komprehensif Teori Gerakan Sosial yang memadukan tiga faktor gerakan sosial. Hal ini menunjukkan, bahwa faktor kesempatan politik gerakan masih sangat kecil, sehingga menyebabkan faktor struktur mobilisasi sumberdaya menjadi kurang maksimal sebagai wahana pergerakan. Faktor pembingkai yang sudah cukup mampu menarik perhatian publik, namun belum bisa memperbesar faktor kesempatan politik secara signifikan. Ketiga faktor menunjukkan masih belum bisa saling menopang dengan baik, sehingga gerakan tolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu sulit untuk mencapai tujuannya.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi maupun tahap

pengembangan gerakan sosial dalam menolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, antara lain:

1. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pemangku kebijakan, terutama dalam kebijakan pengelolaan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu seharusnya melibatkan publik secara partisipatif, karena terutama masyarakat setempat yang pasti merasakan dampak atas aktivitas pertambangan emas. Melibatkan publik secara partisipatif tentu akan menjadikan produk kebijakan yang berkualitas, dan tidak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, seharusnya juga mengkaji ulang keberjalanan aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu, karena polemik yang terjadi di tengah masyarakat sampai saat ini tentu menandakan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu perlu dievaluasi.
2. Gerakan tolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu perlu membentuk organisasi gerakan yang bersifat jangka panjang, mandiri dan kolektif untuk mengelola sumberdaya gerakan secara maksimal, membentuk kekosongan pemimpin yang dibutuhkan, dan meningkatkan keterampilan warga. Organisasi gerakan ini juga diharapkan menjadi forum bersama untuk menentukan agenda-agenda gerakan, dan tentunya dapat memperbesar faktor peluang politik. Adanya upaya pelemahan dari pihak pertambangan, baik berupa rayuan, ancaman teror atau intimidasi, maupun kriminalisasi dapat dihadapi secara bersama melalui organisasi gerakan sosial.

3. Aktor kunci warga atau masyarakat setempat yang saat ini masih terpecah menjadi warga ‘penolak murni’ dan warga ‘penolak tidak murni’ perlu disatukan kembali terutama kepentingannya dalam gerakan. Warga ‘penolak tidak murni’ yang sejauh ini dianggap sebagai duri dalam gerakan perlu disadarkan kembali mengenai bahaya pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi. Meskipun harus membutuhkan proses panjang, hal ini penting untuk dilakukan agar semua aktor kunci dari masyarakat setempat menjadi satu tujuan dalam gerakan, dan tentunya gerakan akan semakin maksimal untuk mencapai tujuan gerakan.
4. Tekad Garuda perlu meningkatkan upaya advokasi litigasi yang sejauh ini masih sangat lemah, seperti mulai melakukan investigasi dugaan pelanggaran perizinan pertambangan emas, mulai dari segala dokumen perizinan sampai dokumen Amdal. Investigasi-investigasi ini tentu sebagai bahan untuk melakukan gugatan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran PT BSI maupun PT DSI. Meski membutuhkan proses panjang, upaya advokasi yang kuat pasti akan menambah semangat dan harapan para aktor-aktor gerakan tolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu untuk mencapai tujuannya.